

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi suatu Negara tidak dapat terlepas dari campur tangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah didalamnya. UMKM telah memberikan kontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat serta berkontribusi dalam produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nasional. Maka tidaklah berlebihan jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2013 UMKM menguasai 96% dari total unit usaha di Asia dengan menyediakan lapangan kerja untuk 50%-85% dari total tenaga kerja; serta berkontribusi terhadap 30%-85% GDP dan 19%-31% ekspor. Misalnya Jepang, pada tahun 2007 UMKM di Jepang menguasai 99,7% dari total unit usaha; menyerap hampir 69% dari total tenaga kerja dan berkontribusi terhadap 53% PDB. Selain itu, pada tahun 2008 UMKM di China menguasai 99% dari total unit usaha dan menyerap 75% dari total tenaga kerja serta berkontribusi terhadap 60% GDP dan 68% ekspor. Dan di tahun 2012, UMKM di Malaysia menguasai 99,2% dari total unit usaha serta menyerap sekitar 75% dari total tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap sekitar 60% PDB.

Di Indonesia, peran UMKM mulai terasa terutama sejak krisis moneter 1998 dan krisis global 2008, dimana pada saat itu usaha besar yang

dibangga-banggakan justru tidak mampu bertahan diterpa krisis. Sebaliknya, usaha mikro kecil menengah dan Koperasi yang selama ini dipandang sebelah mata justru yang mampu bertahan, bahkan berkembang. Sejak saat itu UMKM dipandang sebagai salah satu katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia sudah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, selama 4 (empat) tahun terakhir (2009-2012), jumlah UMKM di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan rata-rata 2,41% setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah UMKM di Indonesia adalah sebanyak 56.534.592 unit yang terdiri dari: 98,79% merupakan Usaha Mikro; 1,11% Usaha Kecil; dan 0,09% merupakan Usaha Menengah; sedangkan Usaha Besar hanya 0,01%.

Selain itu, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga telah menjadi salah satu pendorong penting dalam membangun kekuatan ekonomi Negara. Bukti kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia terlihat pada tahun 2012 dimana UMKM tercatat berkontribusi terhadap PDB Nasional atas harga konstan tahun 2000 mencapai sekitar 59,08% atau senilai Rp. 1.504,93 triliun, dan kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2012 ini mengalami peningkatan 9,90% dari tahun sebelumnya. Besarnya kontribusi juga bisa terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 107.657.509 orang atau sekitar 97,16% dari total seluruh tenaga kerja di Indonesia yang terdiri dari: 90,12% terserap di sektor Usaha Mikro; 2,94% Usaha Kecil; 4,09% Usaha Menengah dan 2,84% untuk Usaha Besar.

Untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri, Dinas KUMKM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 mencatat jumlah UMKM yang terdapat di Kalimantan Barat adalah 86.964 unit usaha, yang terdiri dari Usaha Mikro sebanyak 61.290 unit, Usaha Kecil berjumlah 24.300 dan Usaha Menengah sebanyak 1.374 unit. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang terserap ke dalam UMKM adalah sebanyak 569.478 orang. Sedangkan dari kepemilikan aset, UMKM menyumbang sebesar Rp. 22.320,40 Milyar dengan omzet senilai Rp. 5.546,40 Milyar (Erdi, 2014:2-3).

Perkembangan UMKM yang demikian pesat menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha yang tangguh. Maka tidak salah jika Pemerintah terus memberikan pembinaan dan sejumlah insentif agar sektor ini dapat bertumbuh menjadi sektor yang berdaya saing tinggi khususnya di tengah sejumlah agenda integrasi ekonomi regional dan global.

Potensi yang besar dari UMKM masih sering terkendala masalah klasik yang menjadi fokus utama dalam pengembangannya, yaitu masalah permodalan. Masih cukup banyak pengusaha UMKM yang kesulitan memperoleh akses kredit perbankan. Terbukti dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, hanya 20% UMKM yang sudah terakses kredit bank.

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran KUR per Bank ^{s/d} 31 Oktober 2013

BANK	KUMULATIF (TAHUN 2007 – 31 OKTOBER 2013)		TAHUN 2013 31 OKTOBER 2013		TARGET TAHUN 2013 (Rp. M)
	Plafond (Rp. M)	Debitur (Unit)	Plafond (Rp. M)	Debitur (Unit)	
BNI	12.113,6	184.805	1.434,4	31.755	4.750
BRI	82.246,7	8.918.250	22.949,8	1.781.400	19.000
MANDIRI	12.833,7	255.924	2.037,0	45.471	3.600
BTN	4.155,1	23.215	881,6	4.034	1.250
BUKOPIN	1.756,3	11.760	276,4	1.610	450
BSM	3.509,9	48.058	748,8	12.795	1.500
BNI SYARIAH	142,9	897	101,1	761	200
BPD	12.380,9	158.005	3.053,9	40.748	5.250
TOTAL	129.139,0	9.600.914	31.483,0	1.918.574	36.000

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Dengan jumlah UMKM di tahun 2013 adalah 57.895.721 unit, maka dapat disimpulkan bahwa hingga Oktober 2013 program KUR hanya dimanfaatkan oleh 15,58% unit usaha dari total seluruh UMKM di Indonesia. Data diatas menunjukkan bahwa realisasi KUR masih belum bisa dijangkau oleh sebagian besar pelaku UMKM. Rudiantoro dan Siregar (2012) mengungkapkan bahwa penyebab rendahnya penyaluran kredit adalah karena bank tidak memiliki informasi yang memadai terkait kondisi usaha mikro. Bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR akan sangat berhati-hati dalam memberikan modal pembiayaan. Bank akan memilih

UMKM yang dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit pinjaman, salah satunya dengan menyediakan laporan keuangan usaha mereka.

Sebagaimana dikutip dari Rudiantoro dan Siregar (2012:2), hasil penelitian Baas dan Schrooten menyatakan bahwa mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya. Kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar pengusaha UMKM ketika akan melakukan praktik akuntansi adalah karena kurangnya kedisiplinan serta keterbatasan pengetahuan pemilik dan sumber daya manusia yang dimiliki mengenai akuntansi. Idrus (2000) dalam Mansyur (2012) bahkan menyatakan bahwa pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk ditetapkan.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2009 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) melalui DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) menetapkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) sebagai standar yang dapat menjadi panduan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam melakukan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Standar yang resmi diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2011 silam ini diharapkan dapat membantu pengusaha UMKM dalam menerbitkan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pihak investor dan kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan, disamping untuk membantu pemilik mengetahui kondisi keuangan usahanya serta sebagai pelengkap persyaratan ketika akan mengajukan kredit ke Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Hasil penelitian Narsa *et al* (2012) menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibanding UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama, bahkan lebih muda dari beberapa UMKM lainnya. Salah satu yang mendorong kemajuan UMKM tersebut adalah kemampuan mengakses perbankan, sehingga masalah kesulitan permodalan dapat diatasi.

Adapun objek penelitian ini adalah ekspedisi CV. Mandiri yang berlokasi di Jalan Budi Karya Komplek Villa Gamma No. 20. Usaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan rute Pontianak menuju Sekadau ini tujuh tahun silam ini telah memiliki lebih dari 100 pelanggan tetap. Meskipun sejak tahun 2014 usaha ini sudah menggunakan sistem komputerisasi, namun pencatatan keuangan yang dilakukan pemilik perusahaan masih secara manual dan hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran perusahaan secara sederhana saja.

Kenyataan ini amat menarik dikaji karena walaupun dengan adanya SAK ETAP untuk mempermudah UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan, tapi dalam implementasinya pencatatan keuangan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha UMKM masih jauh dari standar yang ditetapkan.

Penulis menganggap perlu untuk mengkaji masalah yang timbul dikalangan UMKM berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan seharusnya menjadi kebutuhan bagi setiap unit usaha, terutama bagi pemilik usaha, mengingat manfaat yang dapat diperoleh bagi keberlanjutan usaha itu sendiri.

Melihat fenomena masih banyaknya UMKM yang belum bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, maka peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul **“PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP (STUDI PADA UMKM EKSPEDISI CV. MANDIRI) PERIODE TAHUN 2014”**.

Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini UMKM ekspedisi CV. Mandiri akan disebut sebagai perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan SAK ETAP?
2. Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan SAK ETAP?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan dan tujuan penelitian. Penulis membatasi masalah yakni laporan keuangan UMKM CV. Mandiri tahun 2014.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini yakni:

1. Untuk mengimplementasikan cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM CV. Mandiri.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dan mampu memperkaya wawasan penulis mengenai cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar kedepannya pemilik maupun karyawan secara mandiri dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP serta sebagai bahan pertimbangan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan alternatif arah kebijakan.

3. Bagi Akademisi dan Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus menjadi referensi yang memadai untuk penelitian lebih lanjut dengan objek kajian yang lebih mendalam mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Serta menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan ilmu akuntansi.

Universitas Tanjungpura